



<b>Koran</b>	<b>Hal</b>
Haluan	
Padang Ekspres	4
Singgalang	
Pos Metro	

**Tanggal**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**Bulan**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

# Tak Bayar Pajak, Mobnas Ditarik

**PESEL, METRO**

Pemkab Pessel bakal tidak akan mentolerir pejabat eselon di lingkungan Pemkab Pessel untuk memperhatikan dan melihat kendaraan dinas mereka. Tidak saja sekadar memelihara dan mengurusnya akan tetapi juga ditekankan kepada aparat sipil negara (ASN) yang mendapatkan jata kendaraan dinas untuk mengurus persoalan pajaknya.

Hal itu ditekankan melalui warning tegas yang disampaikan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni kepada seluruh kepala dinas dan ASN di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan agar mengurus pajak kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Jika tidak mobil dinas siap ditarik.

"Diminta kepada ASN yang mendapatkan kendaraan dinas agar memperhatikan masalah pajak

kendaraan jangana sampai menunggak. Selain itu juga ditegaskan kepada ASN untuk mengurus SIM kalau tidak kendaraan dinas terancam ditarik," ujar Hendrajoni, kemarin.

Dikatakan Hendrajoni, jauh - jauh hari sebelum pelaksanaan Operasi Patuh Langkisau Tahun 2018 telah mengingatkan kepada seluruh OPD agar secara rutin mengecek kelengkapan kendaraanya, salah satunya adalah pajak. "Kita akan menarik mobil kepala dinas dan Mobnas ASN lainnya yang tidak membayar pajak," tutur Hendrajoni saat dihubungi koran ini, Selasa (1/5).

Ia menambahkan, Pemkab Pesisir Selatan sangat mendukung pelaksanaan Operasi Patuh tahun 2018 yang dilaksanakan Satlantas Polres Pessel. Untuk itu bagi PNS yang belum memiliki SIM Hendrajoni meng-

intruksikan agar mengurusnya ke instansi terkait.

Bagi kendaraan PNS atau pejabat yang terkena tilang karena tidak memiliki surat-surat dokumen kendaraan termasuk pajak dan SIM, Pemkab Pessel meminta hal itu ditindak tegas. Langkah ini dilaksanakan agar pejabat di lingkungan memahami aturan, jangan mau mengantar saja.

"Kita memberikan waktu dua hari untuk mengurus pajak dan SIM pejabat yang belum memilikinya. Jika tidak juga maka kita tegas akan tarik," tegas Hendrajoni.

Berdasarkan pantauan oran ini di Kantor Supras Satlantas Polres Pessel terlihat beberapa orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sibuk mengurus pembuatan SIM. Hal yang sama juga terpantau di lapangan masih ada beberapa kendaraan mobil dinas yang pajaknya mati. (tr)